



UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAHAN
KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK SRI
INDRAPURA PROVINSI RIAU**

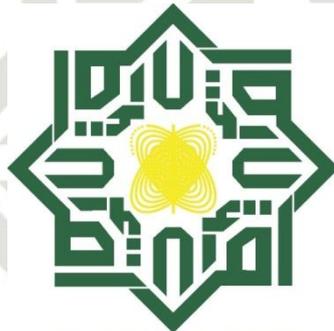
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memeperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Oleh

RIMA YANTI
NIM. 12070522293

UIN SUSKA RIAU

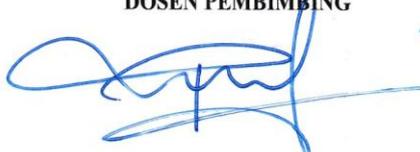
**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rima Yanti
Nim : 12070522293
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Akuntabilitas Publik Pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING



Rony Java, S.Sos, M.Si.
NIK. 130717060

Mengetahui

DEKAN



Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahvarni, S.E, MM
NIP. 197008261999032001

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 1978102 2006041002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rima Yanti
Nim : 12070522293
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Analisis Akuntabilitas Publik Pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau.
Tanggal Ujian : Rabu, 22 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Faiza Muklis, M.Si, S.Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji I
Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
NIP. 19811030 200710 2 004

Penguji II
Irdayanti, M.A
NIP. 19860311 20232 12036

Sekretaris
Reagen Harahap, M.A
NIP. 19920511 2023 211023



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rima Yanti*
 NIM : *12070522293*
 Tempat/Tgl. Lahir : *Rawang Kid Barat, 31 Maret 2002*
 Fakultas/Pascasarjana : *Ekonomi dan Ilmu Sosial*
 Prodi : *Administrasi Negara*

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

*Analisis Akuntabilitas publik Pemerintahan Kecamatan Lubuk
 Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, *Juni* 2024

Yang membuat pernyataan



Rima Yanti
 NIM : *12070522293*

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAHAN KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA PROVINSI RIAU

Oleh :

RIMA YANTI
NIM. 12070522293

Akuntabilitas publik merupakan ciri pemerintahan yang demokratis. Pemerintah tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Kabupaten menjadi bagian penting untuk terciptanya pemerintahan yang akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas publik di Kantor Camat Lubuk Dalam dan apa saja hambatan penerapannya. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara dengan pegawai dan tokoh masyarakat, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam di analisis melalui kerangka pelaksanaan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dalam akuntabilitas vertikal, telah melaksanakan penyusunan LKJIP dan belum melakukan perbaikan pada setiap evaluasi. Akuntabilitas horizontal, telah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menempatkan informasi di sekitar ruangan Kantor Camat Lubuk Dalam, seperti banner dan brosur, namun transparansi informasi yang mencakup informasi publik dan kegiatan instansi belum dilaksanakan. Hambatannya dalam penyebaran informasi dikarenakan belum adanya bagian yang bertanggungjawab dalam hal tersebut dan kurangnya motivasi untuk melakukan adanya perbaikan dari hasil evaluasi.

Kata kunci : Akuntabilitas, vertikal, horizontal

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin penanya atau penerbit. Hal ini termasuk memfotokopi, merekam, mendistribusikan, menyebarkan, atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Akuntabilitas Publik Pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sangat banyak pihak membantu dan mendukung penulisan dan penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berperan karena skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada orang tua Ayahanda Pitoyo dan Ibunda Suyati, yang telah merawati, membimbing, dan memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil. Mereka selalu mendoakan agar anaknya dapat mencapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang sarjana.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan



- © Hakipta milik UIN Suska Riau
 Stage Istemi University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. ~~Dilarang~~ mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan selama skripsi. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan

terima kasihnya kepada:

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si., selaku Wakil Dekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si., selaku ketua jurusan Administrasi negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Mashuri, M.A., selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.

Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si., selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



9. Bapak/Ibu Pegawai Kantor Camat Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam yang telah bersedia membantu dalam meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan bersedia memberikan data, baik data maupun informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

10. Kepada masyarakat yang ikut serta dalam terlaksanakannya penelitian ini dengan membantu melakukan wawancara yang memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

11. Kepada kakak saya Sri Wahyuni dan abang Irmawan yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penelitian dan terbentuknya skripsi ini.

12. Teman-teman jurusan Administrasi Negara lokal E angkatan 2020 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini yang telah membersamai penulis dalam berproses yang menjadi lebih baik.

13. Keluarga Besar Mapala Suska, tempat penulis belajar, dan saudara-saudara angkatan 27 Batu Alam Mapala Suska keluarga besar mapala suska yang telah menjadi tempat penulis menjalani berbagai proses pada masa perkuliahan dan kepada saudara/saudari angkatan 27 Batu Alam yang telah membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Terima kasih kepada diri saya sendiri, Rima Yanti yang telah mampu berjuang dan bertahan sera kuat sampai sejauh ini untuk melewati berbagai rintangan di mulai awal perkuliahan hingga pada tahap akhir. Tetap selalu menjadi pribadi yang baik, memberi kenyamanan dan suasana positif bagi semua orang,

rendah hati, semangat, bertanggung jawab dalam mperjuangkan segala hal baik yang untuk bisa meraih cita-cita yang diinginkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sepenuhnya. karena penulis berharap bagi pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun untuk membantu penulis memperbaiki diri agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Semoga semua doa, inspirasi, dan dorongan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini akan menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua orang. Aamiin, ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 31 Maret 2024
Penulis

RIMA YANTI
NIM. 12070522293

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis iri tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1. Gambaran Umum Kantor Camat di Kecamatan Lubuk Dalam	42
4.2. Letak Dan Kondisi Geografis Kecamatan Lubuk Dalam	42
4.3. Visi dan Misi	44
4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam	45
4.5. Struktur Organisasi.....	51
4.6. Rencana Strategis	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Akuntabilitas Publik di Kantor Camat Kecamatan Lubuk dalam	53
5.2 Faktor Penghambat Akuntabilitas Publik di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam	75
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

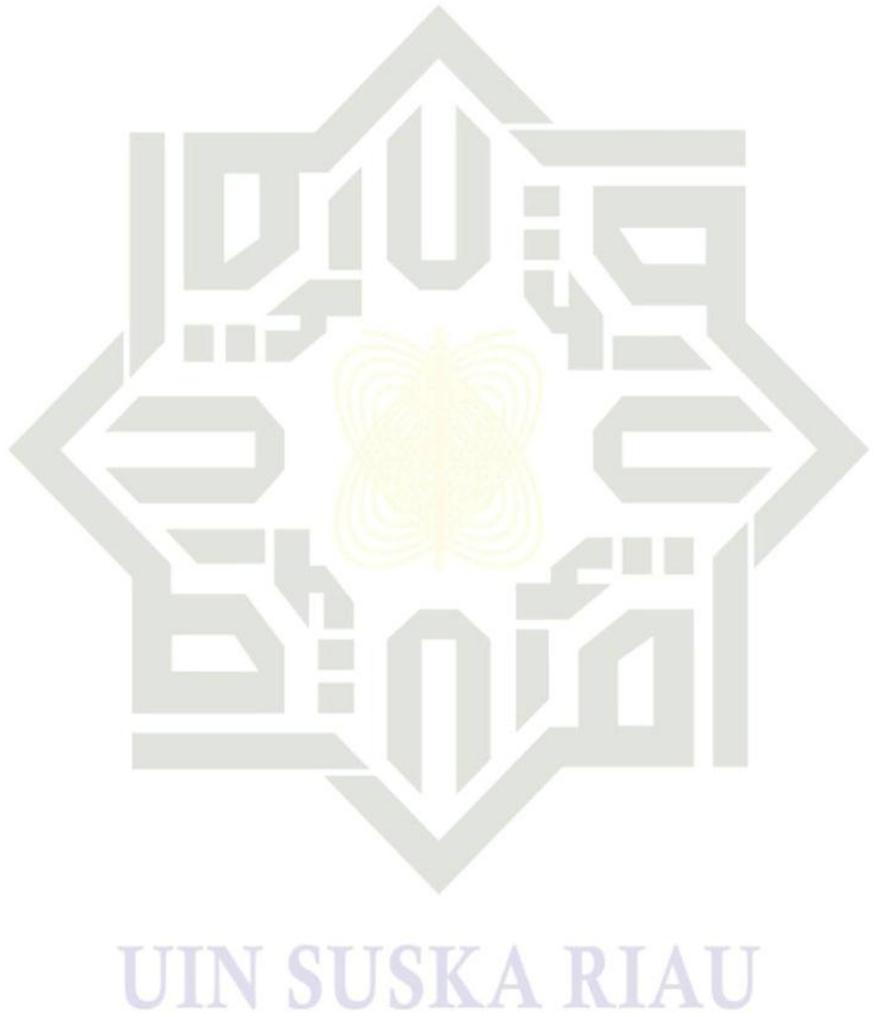
- Hak Cipta Ditangguhkan UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Hasil EKK Provinsi Riau	5
Penelitian Terdahulu	26
Konsep Oprasional	33
Informan Penelitian	39
Luas Wilayah Kampung Lubuk Dalam	43
Batas-batas Kampung Kecamatan Lubuk Dalam	44
Tujuan Dan Sasaran Kantor Kecamatan Lubuk Dalam	52
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	57
Hasil Evaluasi Tahun 2022	62
Indeks Kepuasan Masyarakat	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 1.2 Struktur Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara hak daerah berupa perolehan pendapatan daerah dengan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan Suatu urusan (Juliyanti 2003). Akuntabilitas merupakan syarat yang terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi demokratis dan amanah (*good governance*) (Manggaukang Raba 2020).

Akuntabilitas publik dalam organisasi pemerintahan sendiri berarti memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang tindakan dan kinerja pemerintah. Informasi kepada pemangku kepentingan dan publik adalah pilar utama akuntabilitas publik. Akuntabilitas berarti bahwa suatu organisasi pemerintah telah menetapkan dan memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas untuk program kerja yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan. Selain itu, akuntabilitas akan membantu mengukur bagaimana mereka mengelola dan mempertahankan atau memegang tanggung jawab mereka untuk mencapai hasil (Rondonuwu, 2017).

Akuntabilitas adalah proses jika dilihat dari pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Kelembagaan pemerintahan yang menerapkan akuntabilitas publik, berarti lembaga tersebut selalu dapat mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan nyaman kepada masyarakat



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Ismiah University of Sultan Syaifudin Kasim Riau

(Kamaruddun Sellang 2019). Terkait pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 2 berbunyi “ Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik” (UU RI 1945).

Pentingnya tentang kinerja pemerintah daerah juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hal yang harus diperhatikan antara lain aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain (Jatmiko 2020).

Terdapat 3 fungsi utama dalam sektor publik, yakni melakukan pelayanan publik yang sangat vital bagi setiap kepentingan umum, dalam mendefinisikan kebijakan publik, dan mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, akuntabilitas pelayanan publik menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang telah diberikan pada sektor publik dapat memenuhi suatu kebutuhan masyarakat secara efektif serta efisien (Mardiasmo 2002).

Demikian pula masyarakat dapat melakukan kontrol yang mempunyai rasa tanggungjawab begitu besar untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja (Rafid 2023). Salah satu cara masyarakat dapat mengontrol pelaksanaan tata kelola pemerintahan adalah dengan



menekankan bagaimana pemerintah itu sendiri dan para pejabatnya bertanggung jawab atas tindakannya, sehingga mereka tidak hanya bertanggung jawab kepada pejabat yang lebih tinggi, tetapi juga merasa bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai pemberi amanat.

Salah satu konsep etika yang berkaitan dengan administrasi publik adalah akuntabilitas. Menurut Djalil (2014), istilah ini kadang-kadang digunakan secara anonim dengan istilah yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipersalahkan (*blamevortiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan. Istilah-istilah lain yang berkaitan dengan harapan juga dapat membantu menjelaskan fungsinya sebagai salah satu komponen administrasi publik.

Pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai program dan kebijakan, Dijelaskan pada UU RI Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 20 ayat 1 “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.” Pemberian pelayanan menjadi tanggung jawab dan tugas pemerintah untuk dilakukan secara optimal, akuntabel, dan professional (Viprianti dan Meirinawati 2021).

Penyelenggaraan layanan harus memenuhi asas-asas pelayanan berikut, menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, agar dapat memberikan layanan yang memuaskan bagi pelanggan ialah sebagai berikut: (1) Transparansi, ialah bersifat terbuka, mudah serta dapat diakses dan tersedia dengan mudah



© Jak Iptam mik UIN Suska Riau
 State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hark Scripta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau menyalin seluruh atau sebagian isi tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimengerti; (2) Akuntabilitas berarti bahwa instansi harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan; (3) Kondisional, yang berarti sesuai dengan keadaan dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan mempertahankan prinsip efektifitas dan efisiensi; (4) Partisipatif, yang berarti mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kebutuhan, harapan, dan keinginan masyarakat; (5) Kesamaan Hak: tidak diskriminatif, yang berarti tidak membedakan berdasarkan ras, agama, golongan, gender, atau status sosial; (6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Orang yang memberikan pelayanan publik dan orang yang menerimanya harus memenuhi hak dan kewajiban mereka (Welasari 2016).

Pemerintah tingkat Kecamatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang akan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat setempat. Pada Kantor Camat Lubuk Dalam ialah sebuah organisasi pemerintah daerah yang bergerak di bidang pemberian pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura. Adapun tugas Pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 pada Pasal 10.

Pada tahun 2020 Kantor Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura mendapatkan suatu penghargaan pringkat sebagai kecamatan terbaik, yang mana di dukung oleh data sebagai berikut :



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Hasil EKK di Provinsi Riau

No	Peringkat	Nama Kecamatan
1	Pertama	Lubuk Dalam
2	Kedua	Rumbai Kota
3	Ketiga	Tanah Putih Tanjung Melawan
4	Keempat	Bengkalis
5	Kelima	Dumai Barat

Sumber: *Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Riau 2020 dalam* (Setiadi 2020)

Dari data diatas, menjelaskan beberapa kecamatan yang mendapatkan peringkat se-kecamatan Provinsi Riau. Kecamatan Lubuk Dalam meraih peringkat pertama di tahun 2020 yang mana menandakan bahwa kecamatan tersebut sudah menerapkan beberapa sistem pelayanan dan program dalam meraih posisi tersebut. Adapun program yang ia laksanakan pada tahun 2020 adalah adanya layanan “drive thru”.

Sistem pemeringkatan melalui EKK, adalah sistem pemeringkatan yang digunakan pemerintah Provinsi Riau untuk memberikan penghargaan kepada setiap Kecamatan. Pada tahun sebelumnya yakni tahun 2016, Kecamatan Koto Gasib mendapat peringkat pertama, pada tahun 2017 Kecamatan Kandis mendapat peringkat pertama, pada tahun 2018 Kecamatan Sungai Mandau mendapat peringkat kedua, pada tahun 2020 Kecamatan Lubuk Dalam mendapat peringkat pertama dan pada tahun 2022 Kecamatan Mandau mendapat peringkat pertama (Duri 2022).

Evaluasi SAKIP kecamatan Lubuk Dalam bahwa mengalami penurunan dari tahun 2020 yang memiliki suatu prestasi namun belum bisa mempertahankan hal tersebut. Kantor Kecamatan Lubuk Dalam mengalami penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Maka dapat dilihat dari nilai hasil SAKIP menunjukkan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bahwa nilai SAKIP pada tahun 2020 dengan nilai 49,82 dan pada tahun 2021 dengan nilai 38,75. Dari penurunan nilai hasil SAKIP pada tahun 2021, ada beberapa hal yang menjadi kendalanya, yakni sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan strategi terkait hasil capaian dari target yang ditentukan belum dapat di sediakan;
2. Perjanjian kinerja belum dilaksanakan dengan baik dalam penyusunan kinerja sampai tingkat eselon III dan IV;
3. IKU belum digunakan dalam pengukuran kinerja;
4. Belum adanya informasi terkait keuangan yang terkait pencapaian kinerja;
5. Hasil evaluasi belum dijadikan sebagai perbaikan setiap periode.

Namun pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada nilai SAKIP yakni dengan nilai 65,80. Pada tahun 2022 ini ada beberapa hasil evaluasi yang belum mendapatkan tindak lanjut dari Kantor Camat Lubuk Dalam, sehingga menjadi penyebab belum optimalnya hasil penilaian terhadap AKIP Tahun 2022, yaitu :

1. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen- dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya;
4. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan;



6. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja

Pada hasil evaluasi yang di cantumkan pada SAKIP bahwa di Kecamatan Dalam masih perlunya perbaikan dalam beberapa hal. Maka dalam akuntabilitas publik adanya menampilkan hasil capaian target kinerja pada kecamatan sangat penting, dari hal tersebutlah dapat di ketahui bahwa instansi telah mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam akuntabilitas publik dapat dilihat dari segi pelayanan yang ada di instansi. Karna memberikan suatu pelayanan yang prima adalah salah satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan pada pemerintah tingkat kecamatan. Dalam melayani masyarakat, pemerintah kecamatan juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan (Kuswati 2017).

Selama ini, akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintah hanya terbatas pada laporan kinerja birokrasi, yang biasanya lebih berfokus pada pendekatan normatif procedural berdasarkan hierarki jabatan dan kewenangan dari bawah ke atas. Sementara penekanan pada kesadaran akan amanat rakyat yang harus ditunjukkan melalui sikap dan perilaku pejabat yang dapat diterima dan dihargai sebagai penerapan aturan formal masih sebatas retorika dan belum dapat diwujudkan menjadi produk nyata (Yusuf 2017).

Dalam memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat banyak faktor pendukung ataupun penghambat dalam menjalankan pelayanan publik. Faktor pendukung yang dimaksud seperti tersedianya suatu fasilitas instansi yang



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memadai, kenyamanan ruang tunggu, adanya kejelasan terhadap informasi dan sebagainya. Sedangkan faktor penghambat yang dimaksud seperti adanya kendala dalam proses suatu pengurusan berkas, tidak adanya kebersihan di ruangan tersebut yang membuat rasa tidak nyaman.

Pada Kantor Camat Lubuk Dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mendapatkan respon yang baik, sehingga dapat terlaksanakannya suatu pelayanan yang prima. Namun dalam hal ini suatu persoalan yang muncul pada Kantor Kecamatan Lubuk Dalam terkait penyebaran informasi yang dilakukan secara mandiri oleh instansi tersebut belum dapat terlaksanakan dengan baik. Terkait informasi yang dimaksud adalah seperti pelaporan capaian target kinerja pada instansi, pengelolaan keuangan, hingga aktivitas yang bersifat publik dapat disebarkan menjadi suatu informasi bagi publik.

Penyebaran informasi yang menyediakan hasil capaian Kantor Camat Lubuk Dalam adalah suatu informasi yang akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Seperti halnya capaian pada tahun 2020 yang menjadi suatu prestasi bagi Kantor Kecamatan Lubuk Dalam, atau hal lainnya seperti adanya inovasi pada pelayanan yang di sediakan oleh Kantor Camat Lubuk Dalam karena tidak semua masyarakat mengetahui apa saja inovasi lain dari pelayanan yang ada di Kantor Camat tersebut. Adapun hal lain yang dapat dijadikan suatu informasi penting bagi Kantor Camat Lubuk Dalam yakni pemaparan nilai IKM pada setiap tahunnya, yang menggambarkan bahwa Kantor Camat dapat menjalankan target yang sudah mereka bentuk sebelumnya.

Indrapura judul “**Analisis Akuntabilitas Publik Pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau**”

2. Rumusan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa rumusan penelitian dalam penelitian ini adalah

- a) Bagaimana akuntabilitas publik pemerintah Kecamatan Lubuk dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau ?
- b) Apa saja faktor penghambat akuntabilitas publik pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau ?

3. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui akuntabilitas publik pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam akuntabilitas publik pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau.

4. Manfaat Penelitian

- a) Untuk peneliti
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat merealisasikan aturan etika dalam pelayanan yang sudah diperoleh selama perkuliahan.
- b) Tempat penelitian
Sebagai masukan bagi instansi agar dapat memperbaiki pelayanan yang sudah baik akan menjadi lebih baik pula dan dapat melayani masyarakat dengan yang baik pula.

Har Cipta, Piliindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c) Untuk Fakultas

Untuk menambah daftar pustaka Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta tidak hanya itu juga sebagai referensi bagi peneliti yang lainnya demi perbaikan yang lebih baik.

Fokus Penelitian

Mengenai akuntabilitas publik dalam meningkat pelayanan bahwa sangat membawa pengaruh yang cukup dapat merubah citra instansi tersebut. Jika suatu instansi yang baik akan dapat memberi kebaikan pula pada instansi tersebut begitupun sebaliknya. Maka dari itu pentingnya adanya peran dari akntabilitas dalam meningkatkan suatu pelayanan dalam menjalankan kegiatan pada masyarakat. Maka dari itu fokus penelitian ini ialah “Analisis Akuntabilitas Publik Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau”.

6. Sistematika Penelitian

Secara keseluruhan untuk mempermudah pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini, yang terdiri dari enam bab dan sub bab antara lain yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, fokus penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori yang akan menjadi landasan tulisan pada karya ilmiah ini.



Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang kondisi umum pada Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Bab V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan pembahasan yang secara inti yang dibuat penulis mengenai “Analisi Akuntabilitas Publik Pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau”

Bab VI : Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran dari penulis yang dapat memberikan masukan pada instansi atau pemerintah tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai atau dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat atau sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali dengan benar kekuatan dan kelemahannya. Akuntabilitas publik juga merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi atau instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya (Maani 2009).

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama Bovens (2007), yaitu:

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi); dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas (termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu sendiri baik di tingkat kementerian, lembaga maupun daerah);



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional);

3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Dapat dilihat bahwa akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yakni adanya akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder.

1. Akuntabilitas Personal (*Personal Accountability*)

Dalam tingkat ini, akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang dimiliki seseorang, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika.

Orang yang memiliki prinsip akuntabilitas melihat dirinya sebagai bagian dari solusi daripada masalah.

2. Akuntabilitas Individu

Hubungan antara orang (yang diberi tugas) dan tempat kerja mereka dibahas dalam tingkat akuntabilitas individu. Hubungan antara PNS dan lembaga pemberi kewenangan adalah contohnya. PNS harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, sementara instansi pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan, bimbingan, dan sumber daya yang memadai, serta menghilangkan hambatan kerja.

3. Akuntabilitas Kelompok

Dalam tingkat akuntabilitas kelompok ini, biasanya orang bekerja sama untuk menjalankan kinerja sebuah institusi. Dalam situasi ini, tidak mungkin menggunakan istilah "saya" sebaliknya "kami" terlibat dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses melaksanakan kinerjanya. Untuk mencapai tujuan organisasi (organisasi), pembagian tanggung jawab dan semangat kerja sama antara kelompok lain di organisasi sangat penting pada tingkat akuntabilitas ini.

4. Akuntabilitas Organisasi

Dalam tingkat akuntabilitas organisasi, mengacu pada laporan tentang kinerja organisasi, baik yang dibuat oleh individu maupun orang lain.

5. Akuntabilitas Stakeholder

Dalam tingkat akuntabilitas stakeholder, organisasi pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan kinerja yang adil, responsif. Stakeholder termasuk masyarakat umum dan pengguna layanan, yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya.

Prinsip akuntabilitas mengatakan bahwa publik harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik. Menurut Djamil (2014), sifat pemerintahan yang akuntabel adalah:

1. Mampu menyajikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat;
2. Mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat;
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan serta;

5. Sebagai cara, bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Adapun tujuan dari akuntabilitas sendiri adalah Akuntabilitas Publik bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan dana dan sumber daya publik yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

2. Pengertian Publik

Bahkan ada yang menganggap “*public*” (publik) lebih luas dari pada masyarakat”. Sebaliknya, publik sama dengan masyarakat, karena itu *Public Relations* dianggap sama dengan Humas. *Public Relations* adalah Humas. Sebenarnya alasan kesamaan bukan karena adanya kesamaan arti publik dengan masyarakat, karena jelas keduanya berbeda makna. Menurut Selo Soemardjan dalam buku Rochmaniah, Dharma, and Utomo (2021), masyarakat adalah kelompok orang yang tinggal bersama dan membentuk kebudayaan. Masyarakat memiliki wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang mengikat mereka satu sama lain.

Menurut Soekanto (2006) publik adalah bagian dari masyarakat yang luas itu. Publik terdiri dari kelompok orang atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap masalah tertentu. John Dewey dalam Putra (1999) menyatakan bahwa publik adalah sekumpulan manusia yang mempunyai ciri-ciri:

- 1) Menghadapi masalah yang sama



2) Mengakui bahwa masalah itu memang ada

3) Mengorganisir diri untuk melakukan sesuatu terhadap masalah

Sedangkan publik dalam *Public Relations*, publik adalah orang-orang di dalam dan di luar organisasi. Arti publik hanyalah sebagian dari masyarakat yang lebih besar. Selain itu, masyarakat dalam hubungan masyarakat didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang memiliki kepentingan dan minat yang sama. Oleh karena itu, publik tidak sama dengan masyarakat. Namun, menggunakan istilah "hubungan publik" daripada istilah "hubungan masyarakat" atau "humas" jelas tidak tepat dan terdengar aneh. Masyarakat juga mulai menggunakan istilah "humas" sebagai istilah tambahan untuk hubungan masyarakat di Indonesia.

3. Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Sawir (2022) akuntabilitas publik adalah : “Ini adalah tanggung jawab pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan operasinya kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Sedangkan menurut Mahmudi (2007) yaitu : “Dalam hal akuntabilitas publik, agen bertanggung jawab untuk mengelola penggunaan sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat.”

Menurut Ihyaul Ulum (2004) akuntabilitas publik adalah “Pihak pemegang amanah (*agent*) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan segala



- aktivitas dan kegiatan yang bertanggung jawab kepada pemberi amanah (*Principal*), yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”
- Setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga sektor publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan upaya dananya kepada pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Akuntabilitas publik adalah istilah lain untuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat ini. Dengan kata lain, akuntabilitas berarti menyajikan dan melaporkan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan administrasi keuangan, kepada pihak yang bersangkutan secara teratur untuk mencapai tujuan..
- Akuntabilitas publik ini harus dilakukan oleh suatu organisasi di sektor publik terdiri dari beberapa dimensi. Menurut Mardiasmo (2002) memberikan penjelasan tentang empat jenis akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Akuntabilitas kejujuran, atau akuntabilitas untuk kemampuan, berkaitan dengan mencegah penyalahgunaan, dan akuntabilitas hukum, atau *legal accountability*, berkaitan dengan menjamin bahwa peraturan dan peraturan lain yang berlaku dalam penggunaan sumber daya publik dipatuhi. Akuntabilitas proses, juga dikenal sebagai *process accountability*, mengacu pada seberapa baik prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program, juga dikenal sebagai *program accountability*, terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan apakah alat program telah dipertimbangkan untuk memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal. Akuntabilitas kebijakan *policy accountability* seperti



© *Jak Iptamika UN Suska Riau*
 © *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*

Hal Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang dibuat terhadap DPR/DPRD dan masyarakat umum dikenal sebagai akuntabilitas kebijakan.

Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan akuntabilitas dapat dilakukan dengan memeriksa apakah ada mark-up dan pungutan-pungutan lain di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber pemborosan dan inefisiensi yang menyebabkan biaya tinggi dan kelambanan layanan publik. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses yang berkaitan dengan proses pemeriksaan tender untuk pelaksanaan proyek publik. Dalam proses pemberian kontrak tender, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah proses tender yang diwajibkan untuk persaingan (CT) telah dilakukan secara adil atau menggunakan metode KKN.

Menurut Bovens (2005) mengemukakan adanya akuntabilitas vertikal dan horizontal. Berikut ada beberapa tahapan yang menandakan perubahan akuntabilitas vertikal ke akuntabilitas horizontal pertama, meningkatnya gabungan akuntabilitas administratif, melalui pembentukan ombudsman, auditor, dan inspektur independen, forum tersebut tidak memiliki hubungan hierarki. Kedua, forum akuntabilitas semakin banyak mengadopsi strategi akuntabilitas individual, mereka tidak puas dengan tanggung jawab korporasi atau hierarki; Ketiga, munculnya lembaga-lembaga kuasi otonom atau independen telah melemahkan legitimasi sistem kontrol politik; Keempat, munculnya manajemen publik baru, telah memperkenalkan bentuk-bentuk akuntabilitas yang lebih horizontal ke dalam sektor publik. Hal ini memiliki kesamaan terhadap jenis akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) dapat



Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. ~~M~~alarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Pak ipta m i t k U n S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibedakan melalui : (1). Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan (2). Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

Adapun penjelasan dari jenis-jenis akuntabilitas adalah sebagai berikut :

a. *Akuntabilitas Vertikal (Internal)* merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi; ini berlaku untuk setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara negara, termasuk pemerintah. Setiap pejabat publik, baik individu maupun kelompok, biasanya bertanggung jawab untuk melaporkan kepada atasan langsungnya mengenai kemajuan dalam pelaksanaan tugas atau kemajuan dalam kinerja. Untuk mencapai akuntabilitas yang baik di tingkat kecamatan, beberapa tugas yang terkait dengan akuntabilitas vertikal harus dilakukan, seperti:

- Adanya pelaporan yang rutin pada pihak kabupaten baik terkait capaian kinerja hingga sampai evaluasi kinerja. Hal ini dapat digambarkan dengan adanya laporan LAKIP yang dibuat oleh instansi kecamatan.
- Transparansi, jika informasi lebih transparan, pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih mudah melacak dan mengevaluasi tindakan pemerintah pusat dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah seharusnya secara teratur melaporkan kinerja mereka kepada publik. Pemerintah daerah memberikan laporan tentang pencapaian mereka dalam memenuhi tujuan dan target. Selain memberikan pedoman kebijakan, pemerintah pusat

juga harus menginformasikan peraturan baru atau perubahan yang dapat mempengaruhi pemerintah daerah. Contoh perubahan ini termasuk peraturan tentang pendanaan proyek infrastruktur atau peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah.

b. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan lingkungannya. Dalam hal ini ada beberapa contoh kegiatan yang berkaitan dengan akuntabilitas horizontal di tingkat kecamatan yang dapat dipenuhi untuk mencapainya suatu akuntabilitas yang baik yakni :

- Adanya suatu kerja sama dan koordinasi, Tingkat kerja sama dan koordinasi antara organisasi sekecamatan dan keterbukaan atas kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu festival atau inisiatif bersama dapat menunjukkan adanya kekompakan dalam organisasi tersebut.
- Partisipasi Masyarakat, sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan sejauh mana pemerintah mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat juga merupakan indikator akuntabilitas vertikal.



- Responsif terhadap Keluhan, seperti pemerintah di tingkat yang lebih tinggi merespons keluhan dan permintaan informasi dari pemerintah daerah atau masyarakat juga dapat menjadi indikator akuntabilitas vertikal.

Selanjutnya menegaskan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik, yaitu akuntabilitas merupakan satu mekanisme untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan operasional, yaitu akuntabilitas merupakan mekanisme untuk membantu menjamin pemerintah bertindak secara efektif dan efisien dikemukakan oleh Schacter 2000).

3. Teori yang disangkutkan dengan Al-qur'an

Akuntabilitas dalam perspektif islam mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mendorong individu dan lembaga untuk mengemban tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusannya. Dalam ajaran islam, akuntabilitas memiliki akar dalam konsep tanggung jawab kepada Allah Ta'ālā (vertikal) dan kepada sesama manusia (horizontal). Prinsip-prinsip akuntabilitas ini ditegaskan dalam Al-Quran dan Hadis, serta diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, salah satunya pada aspek/bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam penerapan akuntabilitas pada saat ini sangat penting dikarenakan pada segala perbuatan harus di pertanggung jawabkan serta juga dapat adanya transparansi, serta agar dapat mempermudah suatu pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Berikut beberapa ayat al-qur'an yang menjelaskan mengenai adanya





akuntabilitas atau pertanggungjawaban ataupun pelayanan publik. sebagai berikut

Surah thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

Artinya: “Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”.

Pertanggungjawaban begitu sangat di tekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan (akuntabilitas) di hari pembalasan. Adanya akuntabilitas membuat instansi lebih memperhatikan kepentingan sosial. Adanya akuntabilitas dalam instansi lebih memperhatikan stakeholders dan lingkungan dari pada stakeholders.

Beberapa ayat dalam Al-Quran mengajarkan tentang tanggung jawab sebagai akar dalam akuntabilitas, di antaranya:

Surah al-Baqarah: 286,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

Ayat ini menegaskan prinsip bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas usaha dan tindakannya. Dalam kitab Tafsir al-Mukhtasar, disebutkan bahwa ayat ini bermakna “Barangsiapa berbuat baik, dia akan mendapatkan ganjaran atas apa yang dia lakukan, tanpa dikurangi sedikitpun. Dan barangsiapa berbuat buruk, dia akan memikul dosanya sendiri, tidak dipikul oleh orang lain.”



وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسٌّ وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya."

Ayat ini mengajarkan pentingnya mempertanggungjawabkan penggunaan daya dan akal dalam mengambil tindakan. Dalam kitab Tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa ayat ini bermakna "Sesungguhnya manusia akan diminta pertanggungjawaban mengenai bagaimana ia menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Apabila dia mempergunakannya dalam perkara-perkara baik, niscaya akan memperoleh pahala, dan jika ia mempergunakannya dalam hal-hal buruk, maka dia akan memperoleh hukuman."

Berikut ayat al-qur'an yang menenrangkan tentang pelayanan publik sebagai berikut:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ - وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya: "Dan barang siapa yang bekerja kebaikan seberat biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasannya), dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah pun, niscaya dia akan melihat (siksanya)." (Al-Zalzalah, 99:7-8)

Ayat ini mengajarkan bahwa setiap tindakan baik yang dilakukan dengan sekecil apapun akan dihitung dan dibalas oleh Allah. Inovasi dalam pelayanan dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada sesama, sehingga setiap upaya kecil untuk memberikan pelayanan yang lebih baik juga dihargai dalam Islam.

Al-Quran 4:135:

- © Hak cipta © UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَلِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu seimbang dalam bersaksi karena Allah, walaupun (yang bersaksi) terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu tentang keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu menyimpang (dari kebenaran) atau menolak memberi saksi), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memberikan kesaksian dan tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

4. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat memperkaya teori dan memahami metode dalam mengumpulkan serta mampu mengolah data hasil penelitian. Pada bagian ini mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan yaitu tentang pengaruh *e-Government* terhadap inovasi pelayanan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan Penelitian
Nurul Makhilda, Skripsi, tahun (2013)	Akuntabilitas pelayanan Publik (Studi kasus penyelenggaraan pelayanan izin mendirikan bangunan di kota Makasar)	Bahwa pemerintah Kota Makasar belum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang berdasarkan pada acuan pelayanan solusi pelayanan dan prioritas pemenuhan kepentingan pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelaynan terutama pada biasa pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat sebagai pengguna jasa	Penelitian ini memiliki lokasi penelitian yang berbeda.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© iaktipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>2</p> <p>Ahmad Fadly, Skripsi, tahun (2023)</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan dana desa Keselarau Batulappa Pinrang (analisis akuntansi syariah)</p>	<p>Pemerintah desa Keselarau ini dalam sistem pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas di desa ini telah terealisasi dengan baik hal ini membuktikan dengan terwujudnya pembangunan dalam anggaran yang telah dianggarkan dan tidak terlepas dari peran partisipasi masyarakat. Dan pengelolaan dana desa di desa tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah, prinsip pertanggungjawaban. Prinsip keadilan dan</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai akuntansi syariah.</p>
--	---	--	--



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Skripsi milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			prinsip kebenaran	
Lata Israyani, Pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bulukmba	Skripsi, Tahun (2021)		Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat. Akuntabilitas pelayanan publik memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,003 dengan terhitung sebesar 3,122 Akuntabilitas pelayanan publik mampu menjelaskan perubahan sebesar 13,4% atas Kepuasan Masyarakat. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba menerapkan nilai-nilai Akuntabilitas maka akan	Penelitian ini mengambil subjek penduduk setempat serta lokasi penelitian yang berbeda



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			semakin meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan	
4.	Bill Christian Rondonuwu, M.T. Lapian, dan Josef Karupun, Jurnal (2017)	Akuntabilitas Kinerja aparat dalam pelayanan publik kelurahan sendangan kecamatan kwangkoan	Bahwa Pemerintah Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan telah melaksanakan sistem akuntabilitas sesuai kinerja di tempat dengan peraturan yang ada, namun dengan keterbatasan sumberdaya, maka menghambat pelayanan yang prima kepada masyarakat.	Penelitian ini berfokus kepada akuntabilitas kinerja di tempat penelitian yang berbeda pula
5.	Ayu Sari Layn dan Ruslan Layn, Jurnal Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Di Kantor Camat Leihitu Kabupaten Maluku Tengah	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	Bahwa pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik, Faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan Faktor	Penelitian ini menggunakan rumusan serta pembahasan yang lebih mengarah terhadap pelayanan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2020)			penghambat dalam publik di suatu pelaksanaan transparansi kantor camat dan akuntabilitas dan memiliki pelayanan publik dalam lokasi yang kondisi cukup berbeda baik.	
6.	Dila Erlianti dan Novia Indria Sari, Niara, Tahun (2019)	Analisis akuntabilitas pelayanan kantor lurah bukit timah kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan	Menjukkan bahwa cukup baik pelaksanaan pelayanan dan dipengaruhi oleh partisipatif dan kesamaan hak dalam suatu proses pelayanan serta faktor yang menghambat kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan.	Penelitian ini menggunakan indikator akuntabilitas yang berbeda
7.	Exhasius Maisilahi dan Sugeng Rumiwari, Jurnal ilmu	Akuntabilitas Pelayanan Prima Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu	membuktikan bahwa Akuntabilitas Pelayanan Prima Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu dapat dikatakan sudah baik,	Penelitian ini berfokus kepada sistem pelayanan yang prima



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dan ilmu politik, Tahun (2019)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai berikut;

Akuntabilitas pelayanan prima merupakan suatu asas yang menentukan bahwa kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawab kepada masyarakat ataupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UU yang berlaku.

Akuntabilitas Pelayanan Prima sebagai komoditas public (Public Good) yang diberikan oleh pemerintah sudah semestinya dibarengi dengan kualitas pelayanan yang baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat akan menaruh kepercayaan kepada pemelintah.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hal: 32
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh akuntabilitas pelayanan publik sangatlah penting dan dapat memberi dampak yang positif jika penerapan akuntabilitas yang diterapkan secara maksimal begitupula sebaliknya jika suatu tidak dapat diterapkan maka akan membawa dampak yang negatif.

6. Defenisi Konsep

Agar dapat memudahkan dalam mengolah data guna dapat mendapatkan defenisi yang jelas dalam permasalahan yang bersangkutan, maka diperlukannya defenisi konsep. Konsep adalah gambaran atau penjelasan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti.

- Akuntabilitas juga merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat digunakan sebagai alat/sarana untuk menilai kualitas kinerja aparat sehingga mereka dapat mengenali delngan benar kekuatan dan kelemahannya.
- Publik merupakan sekumpulan orang atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap sesuatu hal, isu, atau kepentingan tertentu.
- Akuntabilitas publik adalah Kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu konsep yang berisi unsur-unsur bagaimana cara mengukur variable untuk memudahkan penelitian di lapangan. Selain itu terdapat indikator ataupun sub indikator sebagai pendukung untuk menganalisis variabel tersebut.

Tabel 1.3
Konsep Operasional

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Bovens (2005) Mengemukakan bahwa akuntabilitas publik terbagi menjadi dua yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal	Akuntabilitas Publik	Akuntabilitas Vertikal	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun laporan kinerja seperti LAKIP, • Adanya perjanjian kinerja, • Adanya gambaran terkait capaian kinerja, • Adanya evaluasi kinerja.
		Akuntabilitas Horizontal	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya akses informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, • Adanya sistem pengaduan masyarakat • Respon masyarakat terkait pelayanan di Kantor Camat • Adanya penilaian terkait tingkat kepuasan masyarakat

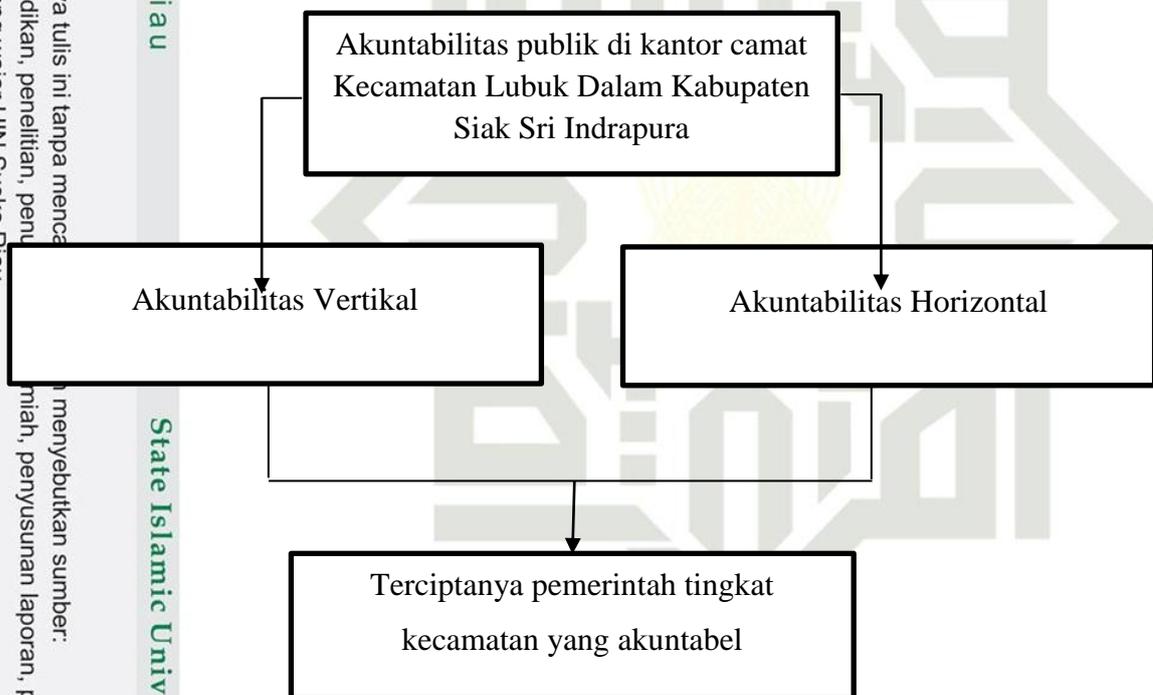
Sumber: Teori Akuntabilitas publik menurut (Bovens 2005)



2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep yang memaparkan secara besar alur berjalannya sebuah penelitian dan menunjukkan persepsi berkenaan antara variabel satu dengan variabel lainnya mengenai yang diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Secara skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Sumber : Teori Akuntabilitas publik menurut (Bovens 2005)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menjiplak seluruh atau sebagian dari isi tulisan ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura yang beralamat di Jalan Pembangunan sebelah kiri Desa Lubuk Dalam, Riau. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini karena adanya suatu hal yang harus dibuktikan dalam hal pelayanan karena minimnya mendapatkan informasi mengenai kantor tersebut hal ini membuktikan bahwa kurangnya akuntabilitas serta transparansi di dalam hal tersebut.

1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif. Menurut Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Hodgett & Stole (2012) penelitian studi kasus pada individu, kelompok, komunitas, serta sebagainya bertujuan untuk membantu membagikan hal-hal yang krusial agar menjadi perhatian atau fokus, dalam mencari solusi dari sebuah masalah penelitian. Sedangkan Menurut Herdiansyah (2015) penelitian studi kasus adalah rancangan penelitian yang bersifat komprehensif, merinci, intens, dan mendalam, dan terarah pada upaya dalam menelaah masalah-problem atau kenyataan yang bersifat pada masa ini atau terbatas waktu (Salma 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang dapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

3. Sumber Data

Dalam memperoleh informasi dan data serta penjelasan-penjelasan dan data yang dipergunakan, maka dari itu penulis menggunakan metode sebagai berikut:

3.3.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari:

- a. Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati suatu kondisi lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian.
- b. Wawancara dengan narasumber yang mendalam dapat menghasilkan suatu informasi yang dapat menjadi data pendukung bagi penelitian.

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan dan pengolahan data dari sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter).

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Gambaran umum kantor Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura
- b. Sejarah Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura
- c. Gambaran akuntabilitas Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura
- d. Jumlah pengurusan berkas di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dari tahun 2021-2023.
- e. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Sarana dan Prasarana.
- f. Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Teknik Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) dalam Fairus (2020) Observasi adalah suatu proses pengumpulan data secara langsung dari lapangan, diawali dengan pengamatan, kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan. Peneliti melakukan pengamatan di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yusuf (2014:384) dalam Fairus (2020) kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami, salah yang bertanya dan juga melihat bagaimana hubungan antara satu aspek dengan aspek yang lain pada objek yang ditelitinya.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan Kasulbag umum, Kasubag dibagian paten, dan Masyarakat yang merasakan bagaimana sistem pelayanan di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura tersebut apakah sesuai dengan apa yang ada di dalam sistem yang menjadi acuan bagi instansi tersebut, dan atas penilain akuntabilitas. Dari wawancara ini akan dihasilkan data yang berupa data kualitatif dalam bentuk tulisan deskriptif yang menggambarkan mengenai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

b. Dokumentasi

Menurut Yusuf (2014) dalam Fairus (2020) dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang maupun sekelompok orang, peristiwa dan kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti mengambil dokumentasi berupa data dan dokumentasi gambar maupun foto di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura..

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010) dalam Arifa (2023) Pengertian informan penelitian adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang dingkat. Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti ia mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial. Berikut adalah informan dalam penelitian ini yakni:

Tabel 1.4
Informan Penelitian

No	Informan	keterangan
1	Sekretaris Camat	1 Orang
2	Staf di bidang Pelayanan	2 Orang
3	Mayarakat yang menggunakan layanan Kantor Camat	3 Orang
Jumlah		6 Orang

3.6. Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Prasetya Irawan (2006) teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan,



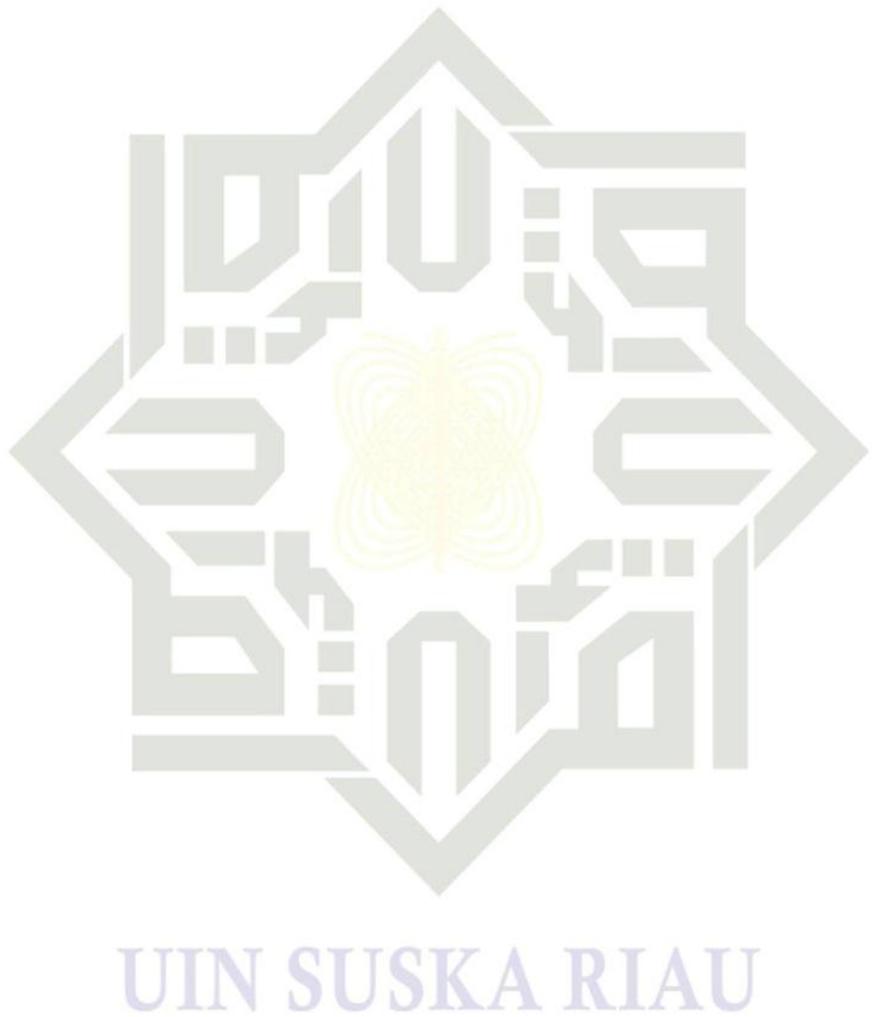
© hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Halqita Bilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian dikumpulkan guna meningkatkan pemahaman terhadap suatu fenomena, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Sugiyono (2015) dalam (Salma 2022), reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data biasanya dilakukan dengan dibantu dengan peralatan elektronik, seperti komputer yang digunakan untuk memberi kode pada berbagai aspek tertentu. Reduksi data juga digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitian agar mencapai tujuan yang dicapai.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memahami dan menafsirkan makna dari suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Berdasarkan beberapa teori di atas, dalam penelitian ini peneliti memilih teknik analisis data yaitu analisis data kualitatif. Proses analisis kualitatif dimulai dari menelaah data yang didapat dari wawancara dengan informan penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi yang terkait dengan etika para pegawai Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang hendak membuat paspor atau mengurus keperluan yang bersangkutan dengan kantor Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Dari setiap data yang ditelaah harus diketahui maksud dan maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung atau penjelasan dari hasil wawancara dengan informan penelitian.



Hak Cipta Milik Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kantor Camat di Kecamatan Lubuk Dalam

Kecamatan Lubuk Dalam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 41 Tahun 2002 tanggal 28 Nopember 2002, yang merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Kerinci Kanan. Kenyataan ini menunjukkan percepatan pertumbuhan wilayah yang semakin tinggi. Kondisi tersebut tentunya sangat membutuhkan strategi pengembangan yang optimal guna mengantisipasi arah pembangunan, penataan dan arah pengendaliannya.

Pemekaran ini bertujuan untuk mempermudah penduduk dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi dipemerintahan serta untuk mempermudah jangkauan pembangunan. Maka dengan demikian potensi dan pembangunan yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam ini akan lebih baik dan mudah dengan jangkauan pemerintahan yang lebih dekat.

4.2. Letak Dan Kondisi Geografis Kecamatan Lubuk Dalam

Dilihat dari kondisi wilayahnya Kecamatan Lubuk Dalam terletak antara 00 00' - 00 38' lintang utara dan 1010 38' - 1010 56' bujur timur. Wilayah Kecamatan Lubuk Dalam seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dan berbukit-bukit dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Kecamatan Lubuk Dalam secara umum berada pada daerah perbukitan dengan ketinggian antara 0-50 meter diatas permukaan air laut dengan kemiringan 3%-15%, dan mengalir banyak aliran sungai.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam secara keseluruhan memiliki luas wilayah ±22.993 Ha, dengan Kampung terluas yaitu Kampung Lubuk Dalam dengan luas 82,25 Ha, rincian luas masing-masing kampung antara lain :

Tabel 1.5
Luas Wilayah Kampung di Kecamatan Lubuk Dalam

	Kampung	Pusat Pemerintahan	Luas Wilayah (Ha)	DUSUN	RT	RK	Jarak Dengan Ibu Kota Kecamatan (Km)
1	Lubuk Dalam	Dusun Raja Gasib	82.25	3	20	5	1
2	Rawang Kao	Rawang Kao	81.17	3	13	3	1
3	Sri Gading	Dusun Sidomulyo	13.58	3	18	6	4
4	Sialang Baru	Dusun Pring Gading	16.94	3	21	6	3
5	Sialang Palas	Dusun Rejosari	10.83	2	16	4	7
6	Empang Baru	Dusun Sidomulyo	16.66	2	15	4	7
7	Rawang Kao Barat	Dusun Sialang Bakti	8.50	2	8	2	1
Jumlah			22.993	18	111	30	

Sumber : (Kantor Camat Lubuk Dalam 2023b)

Pusat pemerintahan Kecamatan Lubuk Dalam terletak di Kampung Lubuk Dalam yang berjarak ± 55 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten. Secara garis besar wilayah Kecamatan Lubuk Dalam terdiri atas lahan perkebunan yang didominasi oleh perkebunan sawit. Perkebunan tersebut sebagian besar dimiliki oleh perusahaan dan masyarakat. Selain itu, lahan di Kecamatan Lubuk Dalam ditanami dengan tanaman pangan seperti jagung, singkong dan tanaman lain seperti palak, lada hitam dan lain sebagainya.

Mengenai batas-batas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Koto Gasib
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Kerinci Kanan



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Tualang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Dayun

Tabel 1.6
Batas-batas Kampung Kecamatan Lubuk Dalam

Kampung	Batas Kampung			
	Utara	Selatan	Barat	Timur
Lubuk Dalam	Pangkalan Pisang	Sialang Baru	Pinang Sebatan	Rawang Kao
Rawang Kao	Pangkalan Pisang	Rawang Kao Barat	Lubuk Dalam	Sri Gading
Sri Gading	Kec. Koto Gasi	Empang Baru	Rawang Kao	Buana Makmur
Sialang Baru	Lubuk Dalam	Sialang Palas	Kec. Tualang	Lubuk Dalam
Sialang Palas	Sialang Baru	Seminai	Kerinci Kanan	Empang Baru
Empang Baru	Rawang Kao	Seminai	Sialang Palas	Buatan Baru
Rawang Kao Barat	Lubuk Dalam	Empang Baru	Sialang Baru	Rawang Kao

Sumber : Kantor Camat Lubuk Dalam (2023)

3.3. Visi dan Misi

Visi :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, berikut Visi Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak:

“TERWUJUDNYA KECAMATAN LUBUK DALAM SEBAGAI APARATUR PELAYANAN MASYARAKAT YANG BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERTUMPU PADA PELAYANAN PRIMA”

Misi :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan mencapai Visi Kantor Camat Lubuk Dalam Kabupaten Siak dipengaruhi oleh perubahan lingkungan baik yang bersifat Internal maupun Eksternal.

Beberapa faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan Strategi dalam rangka pencapaian Visi Kecamatan Lubuk Dalam secara efektif dan efisien maka disusun Misi Kecamatan Lubuk Dalam sebagai berikut :

- a. Meningkatkan etos kerja dan disiplin pegawai;
- b. Meningkatkan inisiatif pegawai;
- c. Mengembangkan pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang keahlian;
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab;

4.4. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam

Kecamatan adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Camat berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, serta melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepala daerah dan tugas lainnya. Dalam hal ini, pemerintahan kecamatan melalui camat melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah (bupati atau walikota) untuk menangani beberapa urusan yang terkait dengan otonomi daerah.

Ini termasuk perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas penetapan, penyelenggaraan, dan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. Kantor Camat Lubuk Dalam adalah lembaga pemerintah daerah yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Maktila Mik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melayani penduduk di kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 merinci tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Ada beberapa pelayanan yang ada di Kantor Camat Lubuk Dalam sebagai salah satu tugas dari instansi tersebut ialah dalam non perizinan ada pelayanan terkait ahli waris, dispensasi menikah, rekomendasi keramaian, rekomendasi riset, analisis, proposal, dan SKTM, Sedangkan terkait perizinan yaitu surat izin tempat usaha (SITU), izin reklame dan izin optikal.

Adapun tugas dari setiap staf yang ada di Kantor Camat Kecamatan Lubuk

Dalam sebagai berikut :

- a. Camat, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan dan daerah dan peraturan bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/ kampung dan kelurahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sekretaris Camat, mempunyai tugas pokok membina dan melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian dilingkungan pemerintah kecamatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, aset daerah dan kepegawaian;
2. Penyelenggaraan urusan umum, urusan rumah tangga, perlengkapan dan pemeliharaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian;
5. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada atasan;

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum, tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum adalah sebagai berikut :

1. Membantu Sekretaris Kecamatan dalam pelaksanaan tugas penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dibidang pengelolaan urusan administrasi umum, kehumasan, perpustakaan dan kearsipan;
2. Menyelenggarakan dan mengendalikan administrasi umum dan perkantoran;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
4. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
5. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA);
6. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

d. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian, adapun tugas pokok dari Kasubbag Keuangan dan Kepagawaian antara lain :

1. Menyusun rencana operasional program kerja Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
2. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
3. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
4. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
6. Melaksanakan pembendaharaan keuangan;
7. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

- e. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Dalam Melaksanakan tugas pemerintahan, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi dan melaksanakan tugas dibidang pemerintahan dan pelayanan. Seperti melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan perangkat daerah dan atau/ instansi terkait lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung Dan Kelurahan.

Tugas pokok dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan adalah membantu Camat dalam membina, mengkoordinasi dan melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan, seta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

1. Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyelenggarakan pembinaan wawasan kebangsaan, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (POLRI dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana tingkat kecamatan;
- h. Seksi Kesejahteraan Sosial, tugas Pokok Seksi Kesejahteraan Sosial :
 1. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
 2. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, perlindungan anak dan kehidupan beragama serta organisasi social kemasyarakatan lingkup tugasnya;
 3. Melaksanakan pembinaan dibidang sosial yang meliputi pengentasan kemiskinan, bantuan sosial serta bantuan korban bencana;
 4. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 5. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
 6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas seksi kesejahteraan sosial dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

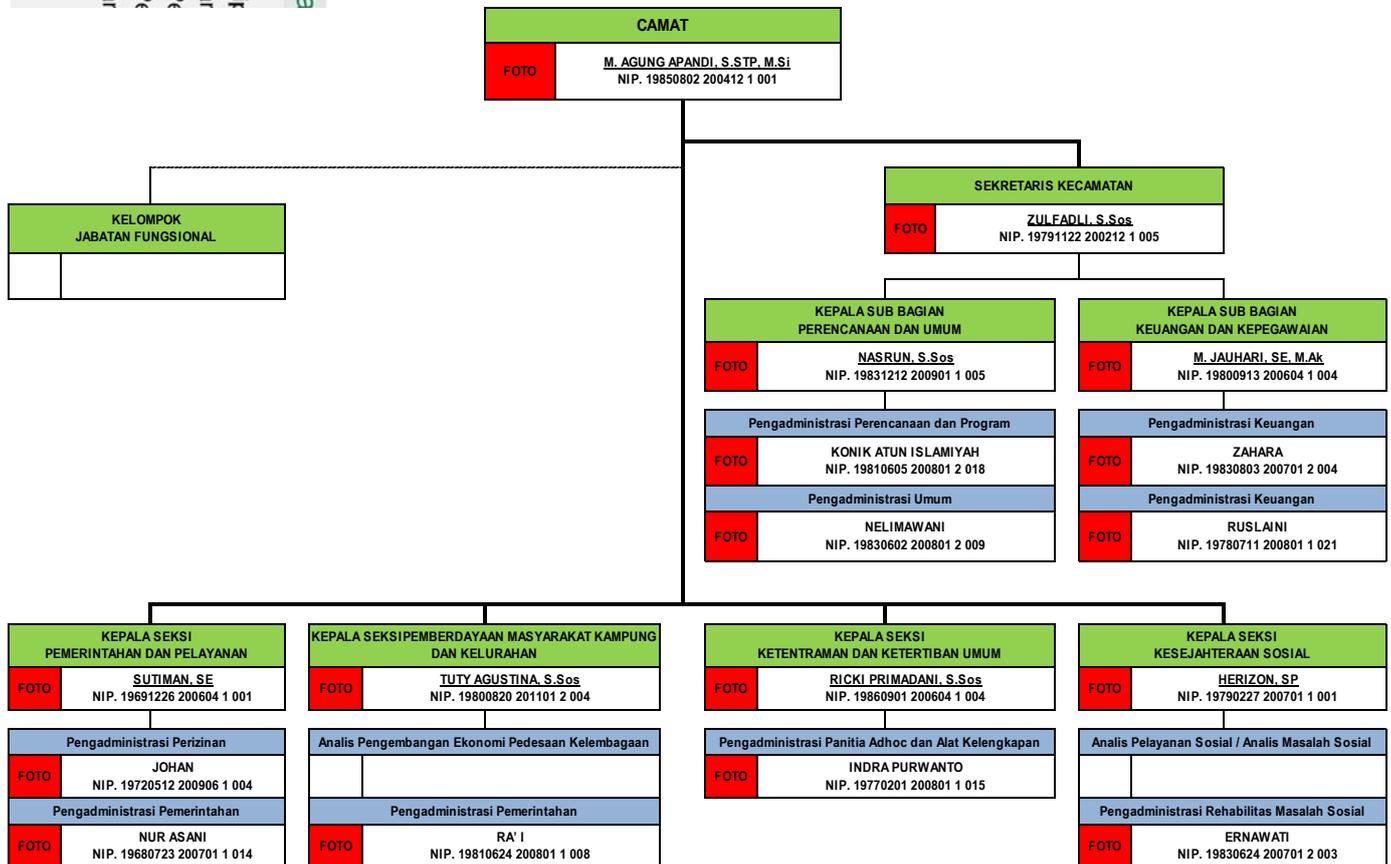
4.5. Struktur Organisasi

- Hak Ciri
 1. Dilar
 a. P
 b. P
 2. Dilar



Gambar 1.2

Struktur Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam
 Sumber : (Kantor Camat Lubuk Dalam 2023b)

4.6. Rencana Strategis

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Lubuk

Dalam, telah memuat tujuan dan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lubuk Dalam tahun 2021-2026, sebagaimana tabel 1.9 berikut

ini

dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 menyebutkan sumber:
 ah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 ini

Tabel : 1.7

Tujuan Dan Sasaran Kantor Kecamatan Lubuk Dalam

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Daerah	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Lubuk Dalam	A	A	A	A	A	A

Sumber: LAKIP Kecamatan Lubuk Dalam tahun 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya bahwa analisis akuntabilitas publik di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam dapat disimpulkan :

1. Akuntabilitas publik di Kantor Camat Lubuk Dalam di analisis dengan menggunakan kerangka akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas publik di Kantor Camat Lubuk Dalam sebagian sudah dilaksanakan dengan baik meskipun belum seluruhnya maksimal. Dapat dilihat dari mekanisme akuntabilitas vertikal adanya pertanggungjawaban Kantor Camat dengan pihak Kabupaten/Kota, pertanggungjawaban tersebut ditandai dengan adanya penyusunan LKJiP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) terdiri dari pelaporan kinerja, capaian kinerja hingga evaluasi kinerja, yang mana menjadi bahan laporan mendapatkan hasil pemantauan kinerja Kantor Camat Lubuk Dalam selama periode tertentu, yang mana mekanisme pelaporan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan mekanisme akuntabilitas horizontal ditandai dengan adanya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan adanya pemberian informasi di lingkungan Kantor Camat baik terkait alur pelayanan hingga struktur organisasi. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa Kantor Camat Lubuk Dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki banner atau spanduk yang berisi informasi pemerintahan. Namun, dalam hal penyebaran informasi publik yang dapat diakses secara online Kantor Camat Lubuk Dalam belum dapat melaksanakannya.

Faktor penghambat akuntabilitas publik di Kantor Camat Lubuk Dalam adalah kurangnya penyebaran informasi terkait capaian kinerja instansi yang telah dilakukan setiap tahunnya. Hal ini serupa dengan belum dapat memberikan informasi terkait kegiatan atau informasi mengenai instansi, hal ini disebabkan karena tidak adanya bagian yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi. Hambatan lainnya seperti kurang adanya koordinasi pemimpin dengan para pegawai terkait evaluasi kinerja yang belum mendapatkan tindak lanjut oleh instansi, serta juga kurangnya motivasi untuk melakukan perbaikan terkait hasil evaluasi yang perlu di tindak lanjuti oleh instansi.

2.2 Saran

Saran atau masukan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Adapun saran-saran yang ingin di sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Menyediakannya akun sosial media atau website resmi yang berisikan informasi terkait dengan Kecamatan Lubuk Dalam, agar dapat memberi kemudahan bagi publik mendapatkan informasi terkait Kecamatan Lubuk Dalam dan menjadikan wadah tersebut berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menambah inovasi pada pelayanan PATEN agar menjadi lebih baik dan membuat para masyarakat merasakan kepuasan pada pelayanan yang diberikan oleh Kantor Camat Lubuk Dalam.
3. Menyediakan fasilitasi pertemuan atau forum dialog rutin antara camat dan masyarakat setempat untuk mendengarkan aspirasi, masukan, dan masalah yang dihadapi oleh warga. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Manfaatkan teknologi untuk mengotomalkan beberapa tugas administratif dan mengurangi waktu pemrosesan dokumen. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat lunak manajemen kantor dan sistem keuangan yang terintegrasi.
5. Untuk memperbaiki kekurangan yang ada di tahun sebelumnya sebaiknya memanfaatkan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja, melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
6. Menumbuhkan rasa motivasi bagi setiap pegawai agar hasil evaluasi sebelumnya dapat di tindak lanjuti dan menjadikan Kantor Camat Lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Qur'an surah thaha ayat 6, surat An-Nisa ayat 135, Surah al-Baqarah: 286, surah Al-Zalzalah, 99:7-8
- Al-Fa. 2023. "Pengertian Informan Penelitian, 3 Jenis, Dan Contohnya." Penelitian Ilmiah.com. 2023. <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>.
- Dodens Mark. 2005. "Akuntabilitas Publik," 7–9.
- Devi. 2022. "Kecamatan Mandau Wakil Kabupaten Bengkalis Pada Penilaian EKK Tingkat Provinsi Tahun 2022." Riau Lantang. 2022. <https://riaulantang.com/kecamatan-mandau-wakili-kabupaten-bengkalis-pada-penilaian-ekk-tingkat-provinsi-tahun-2022/>.
- Prilianti Dila, and Novia Indria Sari. 2019. "Analisis Akuntabilitas Pelayanan Kantor Lurah Bukit Timah Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan." *Jurnal Niara* 12 (1): 35–45. <https://doi.org/10.31849/ni.v12i1.2301>.
- Fairus. 2020. "Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisien Biaya Tenaga Kerja Pada PT Pancaran Samudra Transport, Jakarta." Repository STEI JAKARTA. 2020. <http://repository.stei.ac.id/2172/>.
- Ulum, MD. 2004. "Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar." *Malang: UMM Press*. <http://repository.uniyap.ac.id/276/1/229023118.pdf>.
- Imbaruddin, Amir. 2016. "Birokrasi Akuntabilitas Kinerja (Sebuah Refleksi)," 101–2.
- Inspektoriat Daerah Kab.Siak. 2022. "Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Tahun 2022."
- Prayanti Lala. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukmba." 2021. <https://123dok.com/document/yngrl111-pengaruh-akuntabilitas-pelayanan-kepuasan-masyarakat-kependudukan-kabupaten-bulukumba.html>.
- J. Moleong, L. 2017. "Metode Penelitian Kualitatif." *PT.Remaja Rosdakarya: Bandung*.
- Jatmiko, Bambang. 2020. "Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman)." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (2): 231–46. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau



- Juliyanti, Wiwin. 2023. "Akuntabilitas Publik Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Di Indonesia." *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis* 3 (1): 1–17. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006>.
- Kamaruddin Sellang, Dkk. 2019. *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_mNcEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Pelayanan+publik+adalah+usaha+yang+dilakukan+oleh+kelompok+atau+individu+untuk+memberikan+layanan+publik+yang+be+kualitas+kepada+masyarakat.+Pelayanan+publik+yang+baik+harus+dila
- Kantor Camat Lubuk Dalam. 2023a. "LAKIP Tahun 2023." Kabupaten Siak.
- Kantor Camat Lubuk Dalam. 2023b. "Profil Kecamatan Lubuk Dalam Tahun."
- Kuswati Ranta Esa. 2017. "Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul" 4 (1): 9–15.
- Layn, Ayu Sari, and Muh. Ruslan Layn. 2020. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 5 (2): 73. <https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.977>.
- Maani, Karjuni Dt. 2009. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik." *Demokrasi* VIII: 1–14.
- Mahmudi. 2007. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *UPP STIM YKPM.Yogyakarta*. <http://repository.uniyap.ac.id/276/1/229023118.pdf>.
- Maisilalahi, E, and S Rusmiwari. 2019. "Akuntabilitas Pelayanan Prima Di Kecamatan Bumiaji Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu ...* 7 (2): 11–15. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1418>.
- Manggala Raba. 2020. *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Universitas Muhammadiyah Malang. 978-979-796-447-4.
- Mardiasmo. 2002. "Akuntansi Sektor Publik." *Andi,Yogyakarta*. <http://repository.uniyap.ac.id/276/1/229023118.pdf>.
- Nasirattunnisaa Mallappiang, Rafid, Hamsu Abdul Gani. 2023. "Akuntabilitas Proses Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Nasirattunnisaa Mallappiang Hamsu Abdul Gani." *Jurnal UNM* 1: 609–19. <https://journal.unm.ac.id/index.php/Semnasdies62/index>.
- Nurul Mukhilda. 2013. "Skripsi Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Program Studi



Administrasi Negara.”

- Prasetya Irawan. 2006. “Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Untuk Ilmu -Ilmu Sosial.” *DIA FISIP UI: Jakarta*.
- Purba, I G. N. 1999. *Manajemen Hubungan Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Rochmaniah, Ainur, Ferry Adhi Dharma, and Djarot Budi Utomo. 2021. *Buku Ajar Dasar-Dasar Public Relations*. Umsida Press.
- Rondonuwu, Bill Christian, M T Lopian, and Josef Kairupan. 2017. “Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan.” *Jurnal Eksekutif* 1 (1): 1–11.
- Salma. 2022. “Reduksi Data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, Dan Contohnya.” Deepublish. 2022. <https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/>.
- Salma. 2023. “Penelitian Studi Kasus.” Deepublish. 2023. <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-studi-kasus/>.
- Sawir, Muhammad. 2022. “Konsep Akuntabilitas Publik.” *Publikasi Jurnal*, 1–27.
- Schacter, M. 2000. “When Accountability Fail: A Framework for Diagnosis and Action.” *Institut on Governance, Canada*. <http://repository.uniyap.ac.id/276/1/229023118.pdf>.
- Setiadi, Febry. 2020. “Inovasi Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapuira Sebagai Kecamatan Pringkat 1 Di Provinsi Riau Tahun 2020.” *Tom Fisip* 9: 1–14.
- Soekanto, S. 2006. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sipriyanti, Sevira, and Meirinawati. 2021. “Kualitas Pelayanan Parkir Berlangganan Untuk Meningkatkan Pendapatan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban.” *Publika*, 227–40. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p227-240>.
- Welasari. 2016. “Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Pemberian Rekomendasi Pengurusan Kartu Di Kantor Camat Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir” 2 (1): 68–84.
- Yusuf, Imam Maulana. 2017. “Etika Dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah.” *Dinamika* 4 (4): 548–57.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa menyebutkan sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Library UIN Suska Riau



LAMPIRAN

PEDOMA WAWANCARA

1. Bagaimana kantor ini berupaya meningkatkan akuntabilitas publik? Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab:
 - a. Apa tanggung jawab utama dari setiap unit atau bagian terkait dengan akuntabilitas publik?
 - b. Bagaimana kantor ini memberikan akses kepada masyarakat terkait informasi publik?
 - c. Apakah ada kebijakan transparansi yang telah diimplementasikan?
 - d. Bagaimana kantor ini melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau perencanaan program?
 - e. Apa langkah-langkah konkret yang diambil untuk mendengarkan dan merespons masukan masyarakat?
 - f. Bagaimana Kantor Camat Lubuk Dalam mengevaluasi kinerjanya dalam hal akuntabilitas publik?
 - g. Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan?
 - h. Bagaimana kantor ini menyampaikan laporan kinerja dan informasi penting kepada masyarakat?
 - i. Apakah ada saluran komunikasi khusus untuk memberikan umpan balik dari masyarakat?
 - j. Apakah pegawai di Kantor Camat Lubuk Dalam mendapatkan pelatihan berkala terkait etika dan tanggung jawab publik?
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



12. Bagaimana pengembangan staf mendukung peningkatan akuntabilitas?

13. Apa hambatan utama yang dihadapi oleh Kantor Camat Lubuk Dalam dalam mencapai tingkat akuntabilitas yang diinginkan?

14. Bagaimana kantor ini mengatasi tantangan tersebut?

15. Jika adanya tantangan maka ada pula faktor pendukung apa saja faktor yang mendukung pencapaiannya tingkat akuntabilitas publik di kantor camat?

16. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kantor Camat Lubuk Dalam untuk terus meningkatkan akuntabilitas publik?

17. Bagaimana inovasi diintegrasikan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi?

18. Apakah instansi adanya jalur komunikasi penampungan terhadap masyarakat mengenai pengaduan atau saran dan kritis dari masyarakat?

19. Bagaimana sistem pelaporan yang dilakukan oleh instansi terkait akuntabilitas tersebut ?

20. Apakah hasil pelaporan atau penilai instansi tersebut di sebarakan kepada publik ?

21. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh instansi dalam memperbaiki segala bidang yang ada di kantor camat ?

22. Apakah hasil evaluasi instansi tersebut di sebarakan kepada publik sebagai informasi yang menunjang adanya transparansi ?

Wawancara terhadap pegawai Administrasi :

1. Apakah ada hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ?

2. Bagaimana cara untuk menghadapi hambatan tersebut?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Sipta milik UIN Suska Riau
- State IsAmia University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apakah adanya sistem penilai terkait pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat?

Apakah Anda merasa bahwa proses pemberian pelayanan di kantor camat sudah cukup transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat?

Jika tidak, bagaimana Anda melihat perbaikan yang dapat dilakukan?

Apakah terdapat mekanisme atau prosedur tertentu yang membantu Anda memastikan bahwa informasi terkait dengan pelayanan publik dapat disampaikan dengan jelas kepada masyarakat?

Apakah Anda memiliki rekomendasi atau saran untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan pelayanan kepada masyarakat di kantor camat?

Apakah ada inisiatif atau program khusus yang diimplementasikan oleh kantor camat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat akuntabilitas publik?

Wawancara terhadap masyarakat :

Bagaimana menurut Anda tingkat transparansi di kantor camat dalam menyajikan informasi terkait kegiatan ?

Bagaimana pendapat Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di kantor camat? Apakah ada saluran komunikasi atau forum yang memungkinkan partisipasi publik?

3. Apakah Anda merasa bahwa kantor camat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek publik? Jika tidak, bagaimana menurut Anda dapat ditingkatkan?

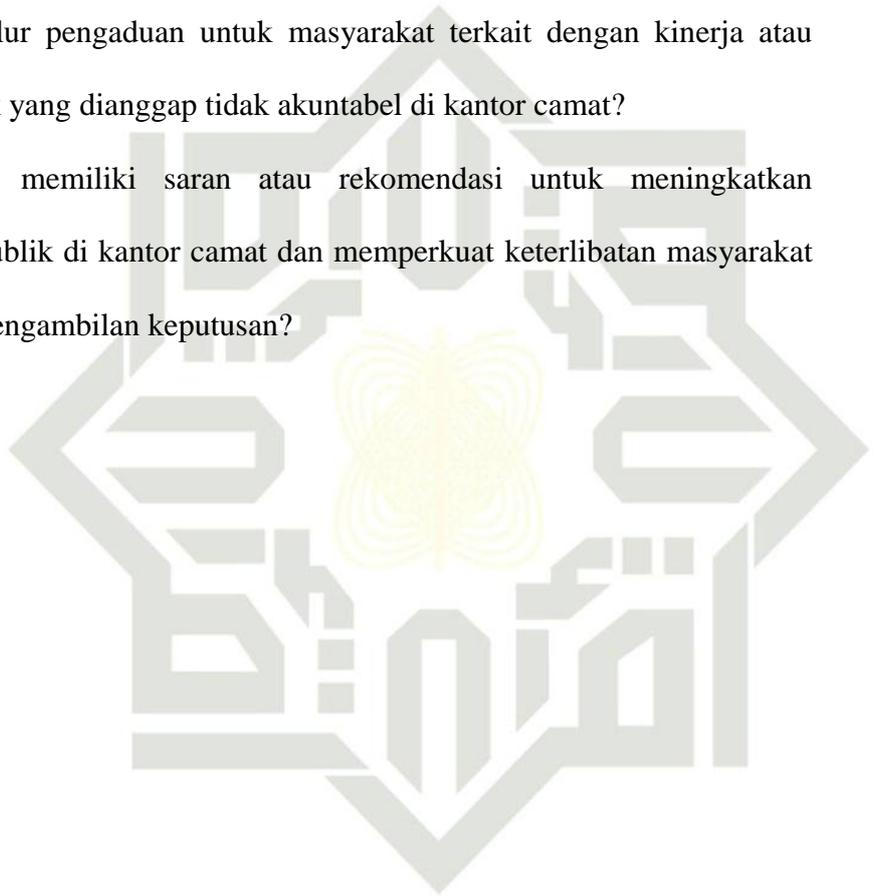


UIN SUSKA RIAU

4. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor camat? Apakah ada aspek tertentu yang perlu diperbaiki?
Bagaimana cara kantor camat memberikan pertanggungjawaban terkait informasi publik kepada masyarakat? Apakah ada laporan keuangan atau informasi lain yang dapat diakses secara terbuka?
Apakah ada jalur pengaduan untuk masyarakat terkait dengan kinerja atau praktek-praktek yang dianggap tidak akuntabel di kantor camat?
Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas publik di kantor camat dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan?
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hakipta mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



Lobi Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura



Layanan yang tersedia di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam dan poster

terkait inovasi pelayanan PATEN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Said Muelegi Zeno. S.STP. selaku Sekretaris Camat di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam



Wawancara dengan ibu Mira selaku staf bidang Pelayanan Masyarakat di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung Rawang Kao Barat Bapak Irmawan, yang pernah merasakan pelayanan di Kantor Camat Lubuk Dalam. Dalam pengurusan berkas SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yakni memiliki usaha mabel



Wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung Rawang Kao Barat Bapak Saiful Amri sekaligus selaku Kepala Dusun Sialang Parit, yang pernah merasakan pelayanan di Kantor Camat Lubuk Dalam. Dalam pengurusan ahli waris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan salah satu masyarakat Kampung Rawang Kao Barat Ibu Susi Suhelti, yang pernah merasakan pelayanan di Kantor Camat Lubuk Dalam. Dalam pengurusan berkas legalisir

REGISTER KELUHAN/PENGADUAN MASYARAKAT								
NO	TANGGAL	NAMA PELAPOR	JENIS LAPORAN				ISI LAPORAN	KET
			LISAN	SMS/WA	TELP	SOSMED/WEB		
01	09. 09. 2022	Mardiana					Saya ingin melaporkan keloo omel keliling/bank Htl saku mangkuk tetangga saya jadi saya risih. Maksudnya saaleo Lordebet.	
02	09. 09. 2022	Zaldaini					telangdibaru saya kemas karena kemas bekalnya. kemas dengan ketompa.	
03	10. 10. 2022	Cipta Angga					Pelayanan untuk Surat lebih cepat dapat dipermudah. dan membuat 120 permohonan.	
11	11. 2022	Purnama					Pelayanan membuat surat adalah kurang lengkap. rumah rumah bagaimana perumahan.	
05	11. 2022	Suprianto					ketahu saya saku pamarang rumah sangat kecil. bukan pada jam istirahat pun seperti itu saku. ketahuannya. kemas membuat anak kecil dirumah.	
15	12. 2022	Rahmadi					Telah terdapatnya barang asetukot gorong. membuat fungsinya rusak huan.	

Bentuk form keluhan yang disampaikan oleh masarakat kepada Kanor Camat Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT PELAYANAN PATEN KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK**

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)

NAMA	: VITA	Jam survei :	<input type="checkbox"/>
ALAMAT	: Sri Gaduh	<input type="checkbox"/>	
JENIS KELAMIN	: Perempuan		
PENDIDIKAN TERAKHIR	: SL		
PEKERJAAN	: Guru		
JENIS PENGURUSAN	: ALM WATU		
TANGGAL	: 28/3/23		

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	6. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kompetensi petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dan keramahan. a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak jelas b. Kurang jelas c. Jelas d. Sangat jelas	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas prasarana. a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat baik
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pelayanan. a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik
5. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	

Bentuk Kuesioner terkait kepuasan masyarakat pada unit pelayanan PATEN di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura



Adanya benner informasi mengenai alur PATEN di dalam Ruang Pelayanan agar mempermudah masyarakat untuk memahami hal tersebut.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5353/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/9/2023 Pekanbaru, 26 September 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Rony Jaya, S.Sos., M.Si.
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Sauda 'a bahwa :

N a m a : Rima Yanti
 NIM : 12070522293
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7824/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 29 Desember 2023 M
 Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. **Rony Jaya, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 Nama : Rima Yanti
 NIM : 12070522293
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:
"AKUNTABILITAS PUBLIK DI KANTOR CAMAT KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK SRI INDRAPURA".
 Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Manajemen Lembaga,



Dr. **Kamaudin, S.Sos, M. Si**
 NIP. 195701012007101003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-646/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 19 Januari 2024 M
8 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Camat Lubuk Dalam
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rima Yanti
NIM. : 12070522293
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Akuntabilitas Publik Di Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten
Siak Sri Indrapura" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN LUBUK DALAM

JL. Pembangunan No. 01 - Lubuk Dalam Fax (0764)320973

Lubuk Dalam, 12 Desember 2023

Nomor : /Kec. LD-Pem/2023
 Lampiran : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 di-
Tempat

Hal : **Rekomendasi Pra Riset**

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Nomor : B-7261/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 06 Desember 2023 kami memberikan Rekomendasi Pra Riset kepada :

Nama : Rima Yanti
 NIM : 12070522293
 Jurusan : Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam
 Judul Penelitian : "Akutanbilitas Publik Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura"

Melakukan penelitian di : Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah di tetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/PraRiset dan pengumpulan data ini ;
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset/PraRiset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
3. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset/PraRiset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Camat Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

CAMAT LUBUK DALAM


M. AGUNG APANDI ,S.STP.M.Si
NIP.198508022004121001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Lubuk Dalam ;
2. Saudari Rima Yanti (Yang Bersangkutan) ;



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN LUBUK DALAM

Jl. Pembangunan No. 01 Lubuk Dalam

Lubuk Dalam, 05 Februari 2024

Nomor : 400.3/Kec. LD-Pem/109.a
Lampiran : -

Kepada Yth,
**Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial**
di-
Tempat

Hal : **Rekomendasi Riset**

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU Nomor : B-646/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 19 Januari 2024 kami memberikan Rekomendasi Riset kepada :

Nama : Rima Yanti
NIM : 12070522293
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang : S1
Alamat : Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam
Judul Penelitian : "Akutabilitas Publik Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura"

Melakukan penelitian di : Kantor Camat Kecamatan Lubuk Dalam

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini;
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
3. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset/PraRiset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Camat Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

CAMAT LUBUK DALAM

M. AGUNG APANDI, S.STP, M.Si
NIP.198508022004121001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Lubuk Dalam ;
2. Saudari Rima Yanti (Yang Bersangkutan) ;

BIOGRAFI PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.



Rima Yanti, lahir pada tanggal 31 Maret 2002 di Desa Rawang Kao Barat, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau. Penulis merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dan dari kedua orang tua yang luar biasa. Kedua orang tua

Ayahanda Pitoyo dan Ibunda suyati yang sangat berpengaruh di segala proses penulis. Penulis menyelesaikan pendidikan mulai dari tingkat TK (Taman Kanak-kanak) di TK Darul Ulum Rawang Kao dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Lubuk Dalam dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Lubuk Dalam dan selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Lubuk Dalam dan selesai pada tahun 2020. Pendidikan dilanjutkan pada tahun 2020 di jenjang Perguruan Tinggi Negeri , tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial dengan Program Studi Administrasi Negara melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Pada awal tahun 2020 penulis mengikuti berbagai kegiatan salah satunya PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan) yang di selenggarakan oleh pihak Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya penulis mengikuti salah satu organisasi yakni Mapala Suska, mengikuti selama 2 periode dan selesai pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan wajib yang ada di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yakni PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan KKN (Kuliah

Hak cipta
1. Dilarang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak
UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja Nyata). Penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) berlokasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru, kemudian melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berlokasi di Desa Parit Makmur, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau.

Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Publik Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau” pada proses ini penulis di bimbing oleh Bapak Rony Sosa, S.Sos, M.Si. Penulis melalui berbagai proses hingga Pada tanggal 22 Mei 2024 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan “LULUS” serta sudah berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

